

# PEMIKIRAN IJTIHAD KONTEMPORER YUSUF QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Asni<sup>1</sup>

## Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan hukum masa kini yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Hal ini mendorong beberapa pakar hukum Islam berupaya melakukan pengkajian mengenai ijtihad kontemporer, baik mengenai urgensi maupun metodologinya, antara lain gagasan yang dimunculkan oleh Yusuf Qardhawi.

Konsep ijtihad kontemporer yang digagas Yusuf Qardhawi adalah ijtihad *tarjihi intiqā'i* (ijtihad selektif) dan ijtihad *insya'i* (kreatif) serta integrasi antara keduanya. Sedangkan wujud atau bentuknya dapat dalam bentuk perundang-undangan, fatwa maupun hasil penelitian. Model-model ijtihad tersebut dapat dijumpai dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Kata Kunci:** *ijtihad kontemporer, tarjihi intiqā'i, ijtihad insya'i dan hukum Islam Indonesia.*

## Abstract

*This study aims to discuss the importance of ijtihad in responding current law related problems which increase as world is developed. This urge Islamic law expert to analyze contemporary ijtihad both its urgent and methodology, one of them is the one which is proposed by Yusuf Qardhawi.*

*The contemporary ijtihad by Yusuf Qardhawi is categorized as ijtihad tarjihi intiqā'i (selective ijtihad) and ijtihad insya'i (creative). Such ijtihad can be found in reformation of Islam in Indonesia, particularly in marriage institution and compilation of islamic law.*

**Key words:** *ijtihad kontemporer, tarjihi intiqā'i, ijtihad insya'i dan hukum Islam Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ijtihad merupakan istilah yang sudah cukup populer di kalangan umat Islam, khususnya dalam pengkajian hukum Islam. Ijtihad selama ini dipahami sebagai media untuk melakukan pembaruan-pembaruan terhadap hukum Islam agar bisa disesuaikan dengan perkembangan.

Seperti diketahui, kegiatan ijtihad telah diperkenalkan oleh Rasulullah Saw pada masa awal pembinaan hukum Islam, meski dalam bentuk yang masih sederhana. Isyarat-

---

<sup>1</sup> Asni merupakan dosen Peradilan di Indonesia pada jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Email: [asni.azrai@yahoo.co.id](mailto:asni.azrai@yahoo.co.id).

isyarat dari ijtihad Rasulullah Saw itulah yang mengilhami kesungguhan para sahabat maupun generasi setelahnya, sehingga mereka bisa menyemarakkan perkembangan fikih Islam. Selanjutnya perkembangan ijtihad mencapai puncaknya pada periode *tabi' al-tabi'in*, saat umat Islam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Namun setelah lewatnya masa keemasan tersebut, terjadilah masa kemunduran yang ditandai dengan kebakuan ijtihad yang populer dengan istilah tertutupnya pintu ijtihad.

Gambaran historis di atas bisa menjadi patokan untuk melihat pentingnya posisi ijtihad dalam konteks masa kini yang kian marak diwarnai perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan. Atas kondisi tersebut, keberadaan ijtihad pada masa kini kian menjadi sebuah kebutuhan. Namun ironisnya, ijtihad justru menjadi semacam barang langka di masa sekarang.

Realita ini sangat penting untuk dikaji. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mengangkat pembahasan mengenai wujud ijtihad yang relevan untuk diterapkan dalam kondisi masa kini (kontemporer). Pada kajian ini, penulis merujuk pada konsep ijtihad kontemporer yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi, yang memperkenalkan dua jenis ijtihad relevansinya dengan masalah-masalah kontemporer. Pemikiran inilah yang akan dijadikan kerangka acuan dalam menyorot perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia sekarang ini.

## **B. Permasalahan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan, yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah : Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai ijtihad kontemporer serta relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia? Permasalahan ini akan dikembangkan melalui sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijtihad kontemporer Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana wujud ijtihad kontemporer dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Sekilas Mengenai Ijtihad Kontemporer**

#### **1. Pengertian**

Kata **إجتihad** merupakan bentuk masdar dari kata **اجتهد** yang berasal dari kata dasar **الجهد** yang berakar pada huruf ج, ه, dan د yang memiliki makna dasar

kesukaran.<sup>2</sup> Kata الجهد mempunyai arti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah, kesukaran, mencurahkan segala kekuatan, kemampuan.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian اجتهد secara bahasa oleh Subhy Mahmazaniy diformulasikan sebagai berikut:

استفر اغ الوسع وبذل الجهد<sup>4</sup>

(Mencurahkan segala kemampuan dan mengorbankan kesungguhan )

Sedangkan mengenai pengertian secara istilah, beliau merumuskan:

استفر اغ الوسع في طلب العلم با الا حكام من ادلتها الشرعيه<sup>5</sup>

(Mencurahkan segala kemampuan dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum dari dalil-dalil syara')

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.<sup>6</sup>

Dari pengertian secara bahasa maupun istilah di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ijtihad merupakan sebuah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya.

<sup>2</sup> Lihat Ahmad ibn Faris , *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid I (Cet. II; Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1972), h. 486-487.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 217.

<sup>4</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Cet. III; Beirut: Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tib'ah wa al-Tauzi', 1952/1371), h. 136

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 669.

Sedangkan istilah "kontemporer" berasal dari bahasa Inggris "*contemporary*" yang memiliki arti sezaman, sebaya, seumur, zaman sekarang.<sup>7</sup> Selanjutnya istilah kontemporer diartikan pada masa kini, dewasa ini.<sup>8</sup> Dengan demikian, jika kata "ijtihad" digandengkan dengan kata ini, berarti yang dimaksud adalah ijtihad masa kini, yakni ijtihad dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan yang ada pada masa sekarang ini.

## 2. Macam-Macam Ijtihad Kontemporer

Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang memandang pentingnya ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Menurut beliau, ijtihad kontemporer terdiri dari:

### a. *Ijtihad Tarjihi Intiqā'i*

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad tarjihi intiqā'i* adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain.<sup>9</sup>

Metode ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah: kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, kemashlahatan manusia dan mencegah mafsadat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 143.

<sup>8</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 458.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirāt*, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994), h. 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Fathurrahman Jamil, *mujtahid* dalam tipe *ijtihad* ini hampir sama dengan *ahlu tarjih* dalam klasifikasi *mujtahid* yang dikemukakan oleh ahli ushul fikih pada umumnya. Namun yang harus digarisbawahi, kegiatan *tarjih* yang dilakukan pada era kebangkitan kembali (termasuk saat ini) berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan *tarjih* hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan *tarjih* pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.<sup>11</sup>

Jelaslah bahwa metode *ijtihad* tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-pendapat selainnya. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja datang dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun para ulama *salaf* yang hidup sesudah mereka. Dengan demikian, nilai kegiatan *ijtihad*nya terletak pada kesungguhan *mujtahid* untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa instrumen kontemporer yang menjadi acuan dalam menyeleksi atau mencari pendapat terkuat dari khazanah fikih Islam, yakni:

1). Perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global<sup>12</sup>

Bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Perubahan-perubahan ini menuntut diadakannya peninjauan ulang terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru untuk memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.

2). Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya<sup>13</sup>

Bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1995), h. 32.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, *op. cit*, h. 25

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 29.

zaman modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya. Antara lain perkembangan-perkembangan dalam ilmu alam, Falak, Kimia, fisika, Kedokteran, Patologi, Anatomi dan lain-lain sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat *fuqaha'* yang telah berkembang pada masa-masa sebelumnya.

3). Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya<sup>14</sup>

Adanya desakan zaman dan kebutuhannya mengharuskan seorang pakar hukum Islam masa kini untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum *furu'iyah* dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini, seorang yang berijtihad untuk kepentingan umat Islam dituntut agar selalu memperhatikan kondisi darurat, halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum, sebagaimana arahan Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

b. *Ijtihad Insyai*

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad Insyai* adalah pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan di mana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan demikian, seorang *mujtahid* kontemporer memiliki pendapat baru menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op .cit*, h. 32-33.

Contoh yang dikemukakan beliau adalah tentang zakat tanah sewaan. Menurut beliau, penyewa hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Jadi kedua-duanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.<sup>16</sup>

c. Integrasi antara *Ijtihad Intiq'a'i* dan *Insya'i*

Di samping kedua bentuk *ijtihad* yang telah diuraikan, terdapat juga metode *ijtihad* yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru. Contohnya adalah undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama *salaf* yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat. Di samping dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menentukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, *op. cit.*, h. 36

Jelaslah bahwa aturan tersebut merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara *ijtihad intiqa'i* dan *insya'i*. Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melalui proses integratif seperti itu. Kebijakan seperti ini ditempuh dalam rangka mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Sedangkan bentuk-bentuk ijtihad kontemporer, menurut Yusuf Qardhawi, ada tiga bentuk yakni Perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian.<sup>18</sup> Bentuk-bentuk ijtihad ini dapat dijumpai dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

## **B. Ijtihad Kontemporer dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia**

Menelusuri sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, dapat diketahui bahwa berbagai perkembangan yang telah dicapai dalam hukum Islam di Indonesia selama ini tak lepas dari kontribusi para *mujtahid* Indonesia, baik sebagai pribadi maupun dalam bentuk kelembagaan. Tokoh-tokoh semacam Hasbi Al-Shiddieqy, Hazairin, Munawir Sjadzali, Ibrahim Hozen serta beberapa tokoh lainnya, sepakat akan pentingnya upaya-upaya ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer sebagai dampak dari perkembangan zaman. Sedangkan dalam bentuk lembaga antara lain adalah MUI (komisi Fatwa), Muhammadiyah (Lembaga *Tarjih*), NU (*Bahsul Masail*), ICMI, Persis (Dewan Hisbah), *Jam'iyatul Wasliyah*, *Al-Irsyad* dan lain-lain, masalah ijtihad merupakan salah satu fokus penting aktivitas lembaga.

Para tokoh dan lembaga-lembaga tersebut berusaha melakukan pengkajian untuk merealisasikan ijtihad dalam rangka menghasilkan sebuah formulasi hukum Islam yang bisa diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki karakter tersendiri. Bahkan, lebih jauh upaya-upaya mereka sampai pada perjuangan memasukkan hukum Islam dalam legislasi nasional. Seperti diketahui, salah satu karya puncak para mujtahid Indonesia adalah keberhasilan merumuskan KHI untuk diberlakukan kepada umat Islam di Indonesia. Dari materi-materi yang terdapat dalam KHI tampak bahwa

---

<sup>18</sup> Untuk penjelasan secara rinci dari masing-masing bentuk, lihat Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan judul *Ijtihad dalam Syari'at Islam* (Cet. I; Yakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 181-187.



proses perumusannya dilakukan secara *jama'i* dengan menggunakan berbagai metode, baik *tarjihi intiq'a'i* maupun *insya'i* serta integrasi antara keduanya.

Wujud nyata dari penerapan metode ijtihad *tarjihi intiq'a'i* di Indonesia oleh Fathurrahman Jamil dicontohkan dalam masalah talak. Menurut beliau, mayoritas ulama ahli fikih (termasuk mazhab yang empat) berpendapat bahwa talak dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri meski tanpa saksi. Sedangkan menurut golongan Syi'ah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Agaknya, untuk masa sekarang, pendapat Syi'ah tersebut dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima.<sup>19</sup> Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan disyariatkannya talak di dalam Islam. Menurut Al-Qur'an, talak merupakan jalan terakhir untuk untuk menyelesaikan persoalan suami isteri. Hadis nabi juga menguatkan hal tersebut, misalnya dalam hadis riwayat Abu Daud sebagaimana dikutip berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>21</sup>

Dari Ibnu 'Umar, Nabi SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, demikian halnya aturan-aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia<sup>22</sup>,

<sup>19</sup> Fathurrahman Jamil, *op. cit.*, h. 33.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (tc.; Surabaya: Karya Ilmu, t. Th), h. 22.

<sup>21</sup> Sunan Abu Daud, *Kitab al-Thalaq, Bab Fi Karahiyah al-Thalaq*, Hadis Nomor 1863. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Selain hadis ini, ada juga beberapa hadis yang terkait tentang kebencian Islam terhadap perceraian. Lihat CD ROM al-Kutub al-Tis'ah, Menu *al-Maudhu'* : *Farq al-Zawwaj al-Thalaq/Hukm al-Thalaq/Karahiyah al-Talaq*.

<sup>22</sup> Salah satu asas dari prinsip-prinsip perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang perkawinan adalah "mempersulit terjadinya perceraian", karena tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

namun dalam keadaan tertentu hal itu dibenarkan. Adanya persyaratan saksi memungkinkan pihak suami bisa berpikir dengan baik sebelum menjatuhkan talak.<sup>23</sup>

Jelaslah bahwa mengenai talak, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun KHI yang berlaku khusus untuk umat Islam cenderung mengakomodir pendapat mazhab Syi'ah karena dianggap memiliki dasar yang lebih kuat, yakni ditunjang oleh *nash-nash* dari Al-Qur'an maupun hadis sebagaimana telah disebutkan di atas dan lebih dekat kepada pencapaian maksud-maksud *syara'* serta dinilai relevan untuk perkembangan dewasa ini.

Sedangkan yang berwujud *ijtihad insya'i* adalah mengenai pencatatan perkawinan. Seperti diketahui, dalam kitab-kitab fikih hal ini belum dibahas. Menurut Ahmad Rofiq, hal ini boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil. Aturan pencatatan perkawinan diakomodir dalam hukum perkawinan di Indonesia<sup>24</sup> atas dasar *maslahah mursalah*, yakni untuk menjaga kemashlahatan. Hal ini terutama mencegah dampak negatif bagi pihak istri dan anak-anak jika kemudian hari diterlantarkan hak-haknya oleh pihak suami. Dengan adanya Akta Nikah, maka dapat dijadikan sebagai bukti untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan untuk menuntut hak-haknya yang diterlantarkan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam wujud *ijtihad integrasi* misalnya dalam masalah poligami. Bahwa tindakan poligami yang dibenarkan oleh kalangan ulama mazhab dengan persyaratan adil kemudian diakomodir dalam hukum Islam Indonesia, namun diikat dengan persyaratan tertentu seperti izin dari istri terlebih dahulu serta persyaratan-

---

Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 57.

<sup>23</sup> Fathurrahman Jamil, *op. cit.*, h. 34.

<sup>24</sup> Mengenai keharusan pencatatan perkawinan, lihat Pasal 5 KHI dan teknis pelaksanaannya pada Pasal 6 KHI.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 109-110.

persyaratan lainnya di muka pengadilan.<sup>26</sup> Hal ini merupakan inovasi dari kalangan pakar hukum di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan lembaga poligami sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

Demikianlah wujud ijtihad kontemporer yang telah direalisasikan di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan. Di samping dalam bentuk semacam ini, ijtihad kontemporer di Indonesia juga banyak dalam bentuk fatwa, khususnya dari lembaga-lembaga fatwa semacam MUI maupun dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki lembaga tersendiri dalam bidang pengkajian hukum Islam. Hasil-hasil fatwa mereka antara lain terkait dengan masalah perkembangan dunia kedokteran seperti bayi tabung, keluarga berencana, pencangkokan organ tubuh dan lain-lain sebagainya.

Kontribusi tersebut juga telah dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, antara lain mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, dalam rangka merespon isu-isu gender, demokratisasi dan HAM. Isu-isu ini berdampak pada beberapa kajian dalam hukum Islam seperti hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, kepemimpinan perempuan, kewarisan, hak-hak perempuan dalam berpolitik dan lain-lain sebagainya.

Tentang hal tersebut, di samping dikaji secara kelembagaan, juga banyak disuarakan oleh para ahli hukum Islam secara individual melalui pengkajian ilmiah atau hasil penelitian. Seperti diketahui, masalah-masalah di seputar ini telah menjadi pilihan menarik bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi agama maupun umum untuk diangkat sebagai materi skripsi, tesis bahkan disertasi. Demikian halnya ilmuwan muslim lainnya yang bergelut di dunia penelitian, minat dalam mengangkat topik-topik tersebut sangat tampak pada beberapa kurun waktu terakhir ini.

Demikianlah gambaran tentang wujud ijtihad yang telah dilaksanakan di Indonesia melalui berbagai metode dan bentuk. Upaya tersebut ditempuh untuk menjawab permasalahan-permasalahan kekinian. Upaya-upaya tersebut harus terus digalakkan, karena perkembangan zaman yang demikian dahsyat telah melahirkan berbagai permasalahan kontemporer yang terus bermunculan dari hari ke hari.

---

<sup>26</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan tentang alasan-alasan untuk dapat diberi izin poligami, serta Pasal 5 tentang syarat-syarat poligami.

Realitasnya, dari berbagai permasalahan yang bermunculan, tidak semuanya mendapat respon dari lembaga ijtihad yang ada. Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pihak-pihak yang berkompeten.

### III. PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijtihad kontemporer adalah upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan sebuah aturan-aturan hukum dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman. Upaya ini harus melalui mekanisme atau metode tersendiri. Adapun metode yang diusulkan Yusuf Qardhawiy adalah *tarjihi intiqa'i* dan *insya'i* serta integrasi antara keduanya. Sedangkan wujud atau bentuknya dapat dalam bentuk perundang-undangan, fatwa maupun hasil penelitian.
2. Wujud ijtihad kontemporer telah direalisasikan di Indonesia, khususnya terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Demikian halnya dalam bentuk fatwa dan penelitian ilmiah. Hanya saja upaya-upaya yang ada tidak sebanding dengan banyaknya permasalahan kontemporer yang memerlukan jawaban dari segi hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A.Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, Cet. II, Jakarta: Teraju, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam" dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Daud, Sunan Abu, *Kitab al-Thalaq, Bab Fi Karahiyah al-Thalaq*, Hadis Nomor 1863.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Faris , Ahmad ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid I, Cet. II, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabiy, 1972.
- Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1995.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Cet. III, Beirut: Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tiba'ah wa al-Tauzi', 1952/1371.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indibat wa al-Infirad*, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994.
- , *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan judul *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Cet. I, Yakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, tc. Surabaya: Karya Ilmu, t. Th.
- Rofiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish, "Reaktualisasi dan Kritik" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Edit.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.